

2.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

2.1.1 Daya Dukung Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Daya dukung lingkungan adalah kapasitas atau kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan produktivitas, kemampuan adaptasi, dan kemampuan memperbarui diri. Daya dukung lingkungan diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. Pelestarian daya dukung lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Batas daya dukung ekosistem tergantung pada tiga faktor yaitu:

- a. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia dalam ekosistem tersebut
- b. Jumlah/ukuran populasi atau komunitas
- c. Jumlah sumberdaya alam yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam komunitas tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, daya dukung lingkungan hidup adalah jumlah populasi yang dapat didukung oleh ketersediaan sumberdaya pada lingkungan hidup tersebut.

2.1.2 Daya Tampung Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pelestarian Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

Kapasitas daya tampung merupakan kemampuan optimum lingkungan untuk memberikan kehidupan yang baik dan memenuhi syarat kehidupan terhadap penduduk yang mendiami lingkungan tersebut. Apabila kemampuan optimum telah terpenuhi, sedangkan populasi cenderung meningkat maka akan terjadi persaingan dalam memperebutkan sumberdaya. Untuk mengurangi disparitas pemenuhan kebutuhan masing-masing individu akan sumberdaya maka diperlukan sebuah teknologi yang dapat membantu memperbesar kapasitas sumberdaya. Adanya konsep daya tampung berdasarkan sebuah pemikiran bahwa lingkungan mempunyai batas kapasitas maksimum guna mendukung pertumbuhan populasi penduduk.

Berdasarkan uraian di atas, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

2.1.3 Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung

Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan menentukan kemampuan suatu wilayah dalam batas optimal yang harus diperhatikan untuk dapat mendukung kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.

2.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman

Menurut Deputi Tata Lingkungan Hidup dalam Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (2014), secara umum konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat digambarkan melalui

kerangka sisi permintaan (*demand*) dan sisi penawaran (*supply*). Sisi permintaan lebih didasarkan pada kebutuhan (*needs*) dan pola konsumsi akan sumber daya alam dan jasa lingkungan seperti lahan, air dan sumber daya alam lainnya. Kebutuhan ini akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan penduduk baik di suatu wilayah administrasi maupun wilayah ekoregion.

Daya dukung wilayah untuk permukiman, dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak. Analisis daya dukung (*Carrying Capacity Ratio/CCR*) dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh para perencana dalam menilai batas kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas yang ada di wilayah yang bersangkutan. Pada penggunaan lahan untuk permukiman sangat penting untuk dikaji kesesuaian lahannya apakah dengan dibangunnya permukiman di atas sebuah lahan akan berpengaruh terhadap daya dukung lahan tersebut. Menurut Toubier (1976) dalam Suganda (1988), daya dukung lingkungan yang baik akan tercapai apabila maksimal lahan terbangun/*Building Coverage* (BC) tidak melebihi 70 % dari keseluruhan lahan yang dapat digunakan.

Menurut Muta'ali (2012), kualitas lingkungan akan terpelihara dengan baik apabila manusia mengelola daya dukung pada batas minimum dan optimum, yaitu antara 30-70%. Angka ini diperoleh berdasarkan konsep tata ruang arsitektur bangunan yang harus dipertimbangkan arsitektur alam yaitu 1/3 sampai 2/3 dari seluruh ruang yang dikelola oleh manusia. Apabila pemanfaatan lebih dari 70% atau mendekati 100% maka akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Hal ini dibenarkan oleh Keputusan Menteri Negara Kependudukan/kepala BKKBN Nomor:Kep-03/MEN/MENEG.K/2/1998 Pedoman Umum Indikator Dinamis Keseimbangan Penduduk dan Daya Dukung dan Daya Tampung (Muta'ali, 2012). Menurut Muta'ali (2015) yang disadur oleh Zai (2018), penentuan daya dukung dan daya tampung permukiman juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk, dimana daya dukung permukiman itu merupakan batas kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan permukiman untuk menampung jumlah penduduk. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2004), bahwa seluruh aktivitas manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup membutuhkan ruang sehingga

mempengaruhi ketersediaan lahan. Besarnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah tersebut mendorong ketersediaan lahan untuk mendukung keberadaan penduduknya memiliki hidup yang layak. Dari uraian ini, dapat diketahui 2 variabel pokok yang harus diketahui secara pasti untuk melakukan analisis daya dukung lahan permukiman, yaitu potensi lahan yang tersedia dan jumlah penduduk. Analisis daya dukung (*carrying capacity ratio*) merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran hubungan antara penduduk, penggunaan lahan dan lingkungan. Dari semua hal tersebut, analisis daya dukung dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas manusia yang ada di wilayah yang bersangkutan (Ernamiyanti dan Yunanda, 2019)

Berdasarkan uraian di atas, daya dukung dan daya tampung permukiman dapat diartikan sebagai ukuran ketersediaan lahan permukiman untuk menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal di atas lahan tersebut.

2.2 Penggunaan Lahan

Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*) yang dikutip oleh Notohadiprawiro (2006) lahan merupakan dataran bumi yang ciri-cirinya mencakup segala tanda pengenal, baik yang bersifat cukup mantap maupun yang dapat diramalkan bersifat mendaur, dari biosfer, atmosfer, tanah, geologi, hidrologi dan populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia pada masa lampau dan masa kini, sejauh tanda-tanda pengenal tersebut memberikan pengaruh atas penggunaan lahan oleh manusia pada masa kini dan masa mendatang. Lillesand dan Kiefer (1997) mendefinisikan penggunaan lahan berhubungan dengan kegiatan manusia pada suatu bidang lahan.

Penggunaan lahan dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non-pertanian. Penggunaan lahan pertanian dibedakan atas tegalan, sawah, kebun, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung dan sebagainya, sedangkan penggunaan lahan non pertanian dibedakan dalam penggunaan kota atau desa (pemukiman), industri, rekreasi, pertambangan dan sebagainya.

Penggunaan lahan ini sifatnya sangat dinamis sewaktu-waktu bisa berubah. Perubahannya dapat disebabkan oleh bencana alam dan lebih sering

disebabkan oleh campur tangan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Peningkatan jumlah penduduk dapat berarti pula peningkatan kebutuhan akan lahan baik untuk pertanian maupun pemukiman. Peningkatan kebutuhan lahan ini akan diimbangi dengan mengintensifkan penggunaan lahan maupun perluasan lahan (Suripin, 2004, disitasi Waluyaningsih, 2008). Nasoetion (1991) juga menyatakan beberapa hal yang diduga sebagai penyebab proses perubahan penggunaan lahan antara lain besarnya tingkat urbanisasi dan lambatnya proses pembangunan di pedesaan, peningkatan jumlah kelompok golongan berpendapatan menengah hingga atas di wilayah perkotaan yang berakibat tingginya permintaan terhadap pemukiman (komplek-komplek perumahan), transformasi struktur perekonomian yang akan menggeser kegiatan pertanian/lahan hijau khususnya di perkotaan, dan fragmentasi pemilikan lahan menjadi satuan-satuan usaha dengan ukuran yang secara ekonomi tidak efisien.

Apabila penggunaan lahan untuk sawah berubah menjadi pemukiman atau industri maka perubahan penggunaan lahan ini bersifat permanen dan tidak dapat kembali (irreversible), tetapi jika beralih guna menjadi perkebunan biasanya bersifat sementara. Perubahan penggunaan lahan pertanian berkaitan erat dengan perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat. Faktor utama penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan adalah peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan ini memiliki konsekuensi terhadap perkembangan ekonomi yang menuntut kebutuhan lahan untuk pemukiman, industri, infrastruktur dan jasa.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penggunaan lahan dapat terdiri dari penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non pertanian. Penggunaan lahan pertanian dibedakan atas tegalan, sawah, kebun, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung dan sebagainya, sedangkan penggunaan lahan non pertanian dibedakan dalam penggunaan kota atau desa (pemukiman), industri, rekreasi, pertambangan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penggunaan lahan difokuskan pada kawasan permukiman.

2.3 Permukiman

UU RI No. 4 tahun 1992 Tentang Permukiman menyebutkan permukiman adalah suatu kawasan perumahan memiliki luas wilayah dengan jumlah penduduk

tertentu yang dilengkapi dengan sistem prasarana dan sarana lingkungan dengan penataan ruang yang terencana dan teratur, tempat kerja terbatas sehingga memungkinkan pelayanan dan pengelolaan yang optimal. Namun, UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Permukiman yang mencabut UU No.4 Tahun 1992 tersebut menerangkan, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Berdasarkan pengertian dari perundang-undangan permukiman, permukiman dapat dikatakan sebagai lingkungan yang terdiri dari berbagai hunian dan sebagai tempat melangsungkan kehidupan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dalam perkembangannya, perumahan permukiman di pusat kota ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Constantinos A. Doxiadis disebutkan bahwa perkembangan perumahan permukiman (*development of human settlement*) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penambahan jumlah penduduk dan urbanisasi (Nugroho, dkk, 2016).

- *Growth of density* (Pertambahan jumlah penduduk), dapat disebabkan dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga yang ingin memiliki rumah sendiri sehingga semakin bertambah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.
- *Urbanization* (Urbanisasi), yang disebabkan adanya daya tarik pusat kota sehingga terjadi arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Penduduk yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota akan memilih untuk tinggal di permukiman di sekitar kawasan pusat kota (*down town*). Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permukiman adalah lingkungan yang terdiri dari berbagai hunian dan sebagai tempat melangsungkan kehidupan, baik di perkotaan maupun di perdesaan dan keberadaan permukiman dipengaruhi faktor utama berupa penambahan jumlah penduduk maupun urbanisasi.

2.3.1 Standar Kebutuhan Hunian

Permukiman terdiri dari berbagai jenis hunian. Menurut Standar Nasional Indonesia (2004), permukiman terdiri dari rumah/perumahan, rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, dan rumah susun.

- Rumah, bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga
- Perumahan, kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi sarana dan prasarana lingkungan
- Rumah tunggal, atau hunian tidak bertingkat
- Rumah kopel, rumah hunian gandeng dua
- Rumah deret, rumah hunian gandeng banyak/berderet
- Rumah susun, rumah hunian yang bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan untuk dimiliki bersama/tidak hanya dimiliki satu-dua keluarga.

Untuk menentukan luas minimum rata-rata perpetakan tanah didasarkan pada faktor faktor kehidupan manusia (kegiatan), faktor alam dan peraturan bangunan. Penentuan luas kavling minimum diatur dalam beberapa regulasi, diantaranya yaitu oleh Badan Standardisasi Nasional dan Menteri Perumahan Rakyat.

1) *Badan Standardisasi Nasional*

Luas kavling minimum untuk 1 unit rumah hunian/1 keluarga dapat diperkirakan minimal 100,8 m² dengan standar susunan anggota keluarga berjumlah 5 orang (*Badan Standardisasi Nasional, 2004*).

(Ilustrasi)

1 kk terkecil rata-rata terdiri dari 5 orang (ayah + ibu + 3 anak) maka kebutuhan luas lantai minimum dihitung sebagai berikut :

- Luas lantai per orang dewasa = 9,6m²
- Luas lantai per orang anak = 4,8m²
- Luas lantai utama = (2x9,6) + (3x4,8) m² = 33,6 m²
- Luas lantai pelayanan = 50% x 33,6 m² = 16,8 m²
- **Total Luas Lantai** = 50,4 m²

Jika koefisien dasar bangunan 50%, maka luas kaveling minimum untuk keluarga dengan anggota 5 orang :

$$L_{kav\ minimum} = \frac{100}{50} \times 50,4\ m^2 = 100,8\ m^2$$

2) Menteri Perumahan Rakyat

Ada beberapa peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang mengatur regulasi mengenai luas kavling minimum rumah. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 34 bahwa melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Oleh karena itu lingkungan hunian harus dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah. Berdasarkan ketentuan hunian berimbang maka perkiraan jumlah dan tipe rumah dilakukan dengan komposisi 3 : 2 : 1 (kavling sederhana : menengah : mewah), seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman.

- Rumah Sederhana adalah tempat kediaman yang layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang
- Rumah Menengah adalah rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling antara 200 m² s/d 600 m²
- Rumah Mewah adalah rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling antara 600 m² s/d 2000 m²

Luas kavling rumah sederhana tercantum dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang, dimana luasan kavling untuk rumah sederhana adalah 60-200 m², dengan luas lahan efektif minimal antara 72m² sampai dengan 90m² khususnya dipersyaratkan di kawasan perkotaan bukan pusat kota, serta susunan keluarga penghuni dianggap terdiri dari 3 atau 4 orang.

Lebih lanjut menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang perbandingan jumlah rumah, sekurang-kurangnya adalah 3:2:1 (tiga berbanding dua berbanding satu), yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah.

2.3 Kependudukan

2.3.1 Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan permasalahan krusial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, khususnya negara-negara berpenduduk besar dan padat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data dasar yang diperoleh mengenai jumlah kelahiran, sehingga diperlukan berbagai upaya yang berkesinambungan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang dengan penduduk terbesar nomor empat di dunia, juga menghadapi persoalan yang serupa.

Definisi dari laju pertumbuhan penduduk itu sendiri adalah Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan metode matematik. Metode ini sering disebut juga dengan metode tingkat pertumbuhan penduduk (*Growth Rates*). Metode ini merupakan estimasi dari total penduduk dengan menggunakan tingkat pertumbuhan penduduk secara matematik, atau untuk tingkat lanjutnya melalui fitting kurva yang menyajikan gambaran matematis dari perubahan jumlah penduduk, seperti kurva logistik. Proyeksi berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk mengasumsikan pertumbuhan yang konstan, yang terdiri dari tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial.

a. Metode Aritmatik

Proyeksi penduduk dengan metode aritmatik mengasumsikan bahwa jumlah penduduk pada masa depan akan bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahun.

b. Metode Geometrik

Proyeksi penduduk dengan metode geometrik menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk.

c. Metode Eksponensial

Metode eksponensial menggambarkan pertambahan penduduk yang terjadi secara sedikit-sedikit sepanjang tahun, berbeda dengan metode geometrik yang mengasumsikan bahwa pertambahan penduduk hanya terjadi pada satu saat selama kurun waktu tertentu. Metode ini menggunakan bilangan euler (e) yaitu bilangan pokok dari sistem logaritma natural (\ln) yang besarnya adalah 2,7182818.

Berdasarkan uraian di atas, laju pertumbuhan penduduk dapat dikatakan sebagai angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu, dan metode pengukuran pertumbuhan penduduk ini dapat menggunakan metode aritmatik maupun geometri dan eksponensial.

Laju pertumbuhan penduduk ini dioperasionalkan sebagai pengikat yang sangat mempengaruhi persediaan lahan di wilayah tersebut. Apabila terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi setiap tahun, maka suatu wilayah dikhawatirkan tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan lahan penduduk (Jayadi, dkk, 2018). Kuswara (2012) menuturkan, salah satu faktor yang dapat dijadikan ukuran daya dukung lingkungan adalah ketersediaan lahan yang menggambarkan daya tampung kawasan untuk mendukung pertambahan jumlah penduduk, sehingga pentingnya analisis perkembangan penduduk adalah untuk kaitannya dengan kemampuan kawasan untuk menampungnya, didasari oleh fakta bahwa aktivitas manusia mempunyai dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan karena aktivitas manusia selalu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun sebagian daftar penelitian dengan tema serupa yang pernah dilakukan sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul/Tahun	Tujuan/Sasaran	Variabel	Metodologi/Analisis	Hasil	Kontribusi
<i>Analisis Daya Dukung Dan Kebutuhan Lahan Permukiman Di Kabupaten Lamongan Tahun 2035 (2017)</i>	Menganalisis daya dukung dan kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Lamongan tahun 2035.	Jumlah penduduk, luas wilayah, luas permukiman dan bangunan, luas lahan sawah, luas hutan, dan pertumbuhan ekonomi.	Metode kuantitatif dengan menggunakan studi kepustakaan dari berbagai sumber terpercaya, seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.	Terdapat 7 kecamatan yang memiliki daya dukung rendah dalam kategori pemenuhan kebutuhan ruang pada tahun 2035. Strategi yang dapat diterapkan untuk menekan kebutuhan ruang yang cukup tinggi yakni dengan strategi intensifikasi atau pembangunan rumah secara vertikal.	Sasaran daya dukung permukiman, Dasar Teori, variabel jumlah penduduk dan luas wilayah, serta metodologi berupa studi kepustakaan.

Judul/Tahun	Tujuan/Sasaran	Variabel	Metodologi/Analisis	Hasil	Kontribusi
<i>Analisis Dukung Permukiman Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga (2019)</i> Oleh: Putri, Bayun Handini, dkk.	Mengetahui daya dukung lahan permukiman	jumlah penduduk, data luas wilayah dan luas penggunaan lahan (luas sawah, pekarangan/bangunan, kebun/tegalan, tambak/kolam, dll).	Perhitungan daya dukung lahan permukiman dengan metode survai dan studi pustaka. Analisis yang digunakan yaitu rumus konsep liputan bangunan atau <i>Building Coverage</i> dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.	Daya dukung lahan sebesar 25%, yang tergolong baik. Daya dukung lahan permukiman diprediksi akan mencapai batas optimum 70% pada tahun 2081 dengan jumlah penduduk sebesar 134.322 jiwa.	Sasaran daya dukung permukiman, Dasar Teori, Variabel jumlah penduduk, data luas wilayah
<i>Analisis Persebaran Daya Dukung Permukiman Kecamatan Padamara</i>	Mengetahui bagaimana pola dan daya dukung permukiman Kecamatan Padamara saat ini,	Penggunaan lahan, liputan bangunan dan ruang terbuka, serta statistik kependudukan.	Analisis data primer dan sekunder dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG). Penggunaan teknik analisis kualitatif dan	pola sebaran permukiman di Kecamatan padamara adalah termasuk kategori random dan daya	Sasaran daya dukung permukiman, Dasar Teori, Variabel penggunaan lahan

Judul/Tahun	Tujuan/Sasaran	Variabel	Metodologi/Analisis	Hasil	Kontribusi
<i>Kabupaten Purbalingga</i> (2019) Oleh: Sutomo, dkk.	menganalisis perkembangan permukiman di masa yang akan datang, dan strategi pembatasan perkembangan permukiman.		kuantitatif untuk: Analisis Terdekat menganalisis Persebaran Permukiman 2. Analisis Daya Permukiman Kecamatan Padamara dengan konsep liputan bangunan atau <i>Building Coverage</i> .	1. dukungunya untuk permukiman masih baik, karena building coverage Kecamatan Padamara hanya sebesar 25 % dari luas wilayahnya.	dan statistik kependudukan

Sumber: Kajian Pustaka, 2020

Tabel 2.2 Sintesa Pustaka Penulis

Judul	Tujuan dan Sasaran	Variabel	Metodologi/Analisis
<i>Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kajian Daya Dukung dan</i>	Menganalisis daya dukung dan daya tampung permukiman serta ketersediaan lahan permukiman untuk jangka waktu 12 (dua belas) tahun	Penggunaan lahan (luas Permukiman eksisting dan rencana), populasi penduduk (proyeksi), serta	Metode yang digunakan secara keseluruhan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. (1) Analisis Daya Dukung Permukiman, merupakan bagian dari analisis daya

Judul	Tujuan dan Sasaran	Variabel	Metodologi/Analisis
Daya Tampung Permukiman di Kelurahan Karang Joang (2020-2032)	yang akan datang. Sasarannya diantaranya yaitu; (1) Analisa daya dukung lingkungan permukiman berdasarkan luas lahan, ketersediaan ruang permukiman dan populasi penduduk, dan (2) Analisa daya tampung sarana hunian di lingkungan permukiman berdasarkan luas ketersediaan ruang permukiman dan kebutuhan sarana hunian, dan (3) Rekomendasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung	kebutuhan sarana hunian (per 12 tahun sesuai proyeksi), ketersediaan lahan, komparasi/studi literatur penelitian	dukung dan daya tampung permukiman dengan menggunakan input data jumlah penduduk proyeksi, luas permukiman, luas ruang/kapita (2) Analisis Daya Tampung Permukiman, merupakan bagain dari analisis daya dukung dan daya tampung permukiman dengan menggunakan input data ketersediaan lahan permukiman (luas penggunaan lahan) dan standar kebutuhan luas kavling sesuai Peraturan Menteri Perumahan untuk kebutuhan sarana hunian

Sumber: Kerangka Pikir Penulis, 2020

